

Koltiva Dorong Dialog Multi-Pemangku Kepentingan tentang Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa dan Kepatuhan untuk Keberlanjutan Industri

- Deforestasi di Asia, yang mencakup 15% dari total kawasan hutan dunia ([Our World in Data, 2020](#)), semakin meningkatkan tekanan bagi industri untuk mematuhi regulasi seperti EUDR atau berisiko kehilangan akses ke pasar internasional.
- [Koltiva](#) menyelenggarakan forum "BeyondTraceability Talks" pada 22 Januari 2025, mempertemukan pemangku kepentingan utama di sektor pertanian dan menyoroti perlunya upaya kolaboratif dalam menghadapi tantangan regulasi, termasuk kepatuhan terhadap kerangka kerja yang terus berkembang seperti EUDR.
- Diskusi menekankan pentingnya memenuhi persyaratan anti-deforestasi sekaligus memastikan petani tidak terpinggirkan dari rantai pasok, sehingga inklusivitas dan akses pasar tetap terjaga dengan tetap memenuhi standar keberlanjutan internasional.

Jakarta, 5 Februari 2025 – Pemangku kepentingan dari berbagai sektor industri pertanian berkumpul di forum diskusi "[BeyondTraceability Talks](#)" yang diselenggarakan oleh [KOLTIVA](#), yang bertujuan untuk membahas kepatuhan regulasi untuk sektor pertanian yang berkelanjutan. Diskusi yang mengusung tema "Dari Pertanian ke Pasar Global: Kepatuhan Regulasi untuk Industri Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan" ini berfokus pada tekanan yang semakin besar untuk memenuhi standar keberlanjutan internasional, khususnya [Regulasi Deforestasi Uni Eropa \(EUDR\)](#) dan regulasi baru lainnya, serta kebutuhan mendesak untuk kolaborasi guna mencapai kepatuhan penuh.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar global akan transparansi dan pengadaan yang etis, pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengatasi tantangan kepatuhan, mempromosikan keberlanjutan di dalam industri, dan yang terpenting, inklusi petani dalam rantai pasok. Diskusi yang diprakarsai dan difasilitasi oleh KOLTIVA ini menyoroti peluang signifikan dalam kerangka regulasi seperti EUDR, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), dan Corporate Social Due Diligence Directive (CSDDD), serta menekankan tanggung jawab kolektif para pelaku industri untuk mematuhi regulasi-regulasi tersebut.

Mengidentifikasi Celah Kepatuhan dan Peran Pemangku Kepentingan

Forum ini menghadirkan pertukaran ide di antara para pelaku industri utama, termasuk perwakilan pemerintah, pelaku bisnis pertanian, dan kemitraan publik-swasta, yang berbagi wawasan tentang tantangan terbesar yang mereka hadapi dalam memenuhi regulasi yang terus berkembang. Tujuannya adalah untuk lebih memahami bagaimana organisasi-organisasi ini dapat berkolaborasi untuk mengatasi tantangan tersebut dan

mempromosikan keberlanjutan dalam pertanian, sambil juga berbagi strategi yang dapat diterapkan untuk para pelaku kunci lainnya di sektor ini.

Diah Suradiredja, Sekretariat Pengembangan Dashboard Nasional – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (CMEA), menekankan perlunya pendekatan proaktif terhadap kepatuhan regulasi. "Meskipun EUDR adalah regulasi yang sangat penting, itu bukan satu-satunya. Regulasi baru, seperti CSRD dan CSDDD, juga dapat mempengaruhi cara industri beroperasi. Sangat penting agar semua pemangku kepentingan menyadari kerangka kerja ini dan mulai mempersiapkan upaya kepatuhan mereka dengan tepat," kata Diah.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap standar keberlanjutan internasional, khususnya EUDR yang berfokus pada persyaratan anti-deforestasi untuk produk yang dipasarkan di Uni Eropa. Dashboard Nasional pemerintah, yang berfungsi sebagai platform untuk mengelola data pertanian, telah menjadi cara untuk meningkatkan ketertelusuran dan memantau kepatuhan. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah bekerja untuk membangun basis data komprehensif yang mencakup produsen petani kecil, identifikasi status lahan, dan dokumentasi legal. Hal ini sangat penting karena EUDR dan regulasi serupa menuntut ketertelusuran dan kepatuhan yang rinci, yang sulit dipenuhi oleh produsen petani kecil di Indonesia. Banyak di antaranya yang sulit mengakses alat digital, infrastruktur, dan pendanaan, sehingga sulit untuk memenuhi persyaratan data dan ketertelusuran yang ketat guna membuktikan produksi bebas deforestasi ([RSM, 2024](#)).

Selain itu, program pengembangan kapasitas telah diterapkan untuk membantu produsen petani kecil memahami dan mematuhi persyaratan regulasi. Upaya untuk memastikan legalitas lahan juga sedang dilakukan, memberikan produsen dengan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi standar legal dan keberlanjutan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pelatihan, dan memastikan bahwa petani kecil termasuk dalam inisiatif keberlanjutan yang lebih luas. Pemerintah juga bekerja sama dengan pelaku industri untuk menyediakan sumber daya dan pendanaan untuk upaya-upaya ini.

Inisiatif untuk Mendorong Keberlanjutan

[PISAgro](#), sebuah platform kolaboratif yang mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan di Indonesia, berperan penting dalam mengatasi tantangan terkait kepatuhan regulasi di tingkat petani. Organisasi ini bekerja dengan produsen, koperasi, dan perusahaan untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang memenuhi standar lokal dan internasional.

Salah satu tema utama yang dibahas adalah pentingnya inklusi petani dalam upaya keberlanjutan dan proses kepatuhan regulasi. Petani mewakili bagian signifikan dari tenaga kerja pertanian Indonesia, dan inklusi mereka sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan ketertelusuran yang lebih luas.

Melalui skema kemitraannya, PISAgro fokus membantu produsen memenuhi persyaratan kepatuhan. "Kolaborasi menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan karena setiap pemangku kepentingan memiliki peran penting untuk mendukung produsen petani kecil agar mereka tidak tertinggal," ujar **Insan Syafaat, Direktur Eksekutif PISAgro**. Kolaborasi sangat penting untuk mengatasi hambatan seperti pendirian sistem ketertelusuran dan sertifikasi yang melibatkan biaya signifikan, yang dapat menjadi beban bagi produsen kecil. Penting untuk mengurangi hambatan ekonomi yang dapat mengecualikan petani kecil dari pasar, karena pemain besar yang mampu membiayai investasi ini mendominasi rantai pasok ([Mongabay, 2023](#)).

Sektor swasta dan organisasi nirlaba di komoditas yang terdampak EUDR, seperti karet, minyak sawit, dan kakao, telah berupaya untuk memastikan bahwa produsen petani kecil terintegrasi dalam sistem ketertelusuran yang mendukung kepatuhan regulasi. Organisasi-organisasi ini berfokus pada peningkatan pengumpulan data dan sistem pemantauan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa produsen atau petani dapat memenuhi standar keberlanjutan dan berkontribusi pada rantai pasok pertanian yang lebih luas.

Yayasan FORTASBI Indonesia, misalnya, telah mengembangkan program pelatihan bagi petani kecil untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ketertelusuran dan keberlanjutan. "Misi kami adalah memberdayakan petani dengan alat dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi bagian dari gerakan keberlanjutan global," kata Rukaiyah Rafik, Kepala Sekretariat FORTASBI. "Dengan bekerja sama dengan Koltiva dan mitra lainnya, kami membantu petani memenuhi standar internasional, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, dan meningkatkan mata pencaharian mereka."

Dukungan Komprehensif KOLTIVA dalam Ketertelusuran dan Pengembangan Sumber Daya

KOLTIVA telah berada di garis depan dalam menyediakan solusi teknologi untuk mendukung [ketertelusuran](#) dan [pengembangan sumber daya](#) di seluruh rantai pasok pertanian. Melalui platform unggulannya, [KoltiTrace](#), KOLTIVA menawarkan teknologi canggih yang memastikan transparansi data dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk melacak produk dari benih hingga ke meja konsumen. Platform ini dirancang untuk membantu perusahaan memenuhi persyaratan uji tuntas yang ditetapkan oleh EUDR dan regulasi lainnya, memastikan bahwa produk mereka bebas dari deforestasi.

Pendekatannya melampaui ketertelusuran; KOLTIVA juga fokus pada peningkatan kapasitas untuk memastikan bahwa produsen teredukasi untuk memenuhi tuntutan regulasi. Melalui dukungan langsung yang menyediakan program pelatihan, KOLTIVA membantu produsen memahami pentingnya Praktek Pertanian yang Baik, legalitas lahan, kepatuhan, dan keberlanjutan, memberdayakan mereka untuk meningkatkan praktik mereka dan mengakses pasar internasional.

Tentang pentingnya teknologi dalam mendukung upaya kepatuhan, **Ainu Rofiq, Co-Founder KOLTIVA**, mengatakan, "Peran kami adalah memfasilitasi rantai pasok pertanian yang transparan dan akuntabel. Saya percaya bahwa teknologi sedang mengubah kepatuhan regulasi dalam beberapa cara: transparansi dan ketertelusuran, manajemen risiko, otomatisasi dan efisiensi, serta membangun kepercayaan dengan meningkatkan kolaborasi. Kami bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan bisnis untuk menyediakan solusi yang memastikan ketertelusuran penuh dan membantu pemangku kepentingan memenuhi standar regulasi yang terus berkembang. Semuanya tentang memberdayakan komunitas lokal, meningkatkan integritas rantai pasok, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang."

Seiring dengan berkembangnya lanskap regulasi, pemangku kepentingan harus tetap waspada dan proaktif dalam mempersiapkan tantangan masa depan. Dalam kata penutupan, semua pembicara menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan dan pandangan ke depan untuk mengantisipasi regulasi baru, memastikan bahwa sektor pertanian Indonesia tetap kompetitif dan berkelanjutan. [BeyondTraceability Talks](#) berfungsi sebagai platform untuk memfasilitasi diskusi tentang perkembangan dalam industri pertanian dan untuk menyoroti topik-topik kritis ini.

===

Tentang KOLTIVA

KOLTIVA merupakan perusahaan global terkemuka dalam bidang pertanian berkelanjutan dan penelusuran rantai pasokan, menawarkan solusi teknologi yang berpusat pada manusia dan dukungan solusi di lapangan dengan melakukan digitalisasi bisnis pertanian dan membantu produsen kecil beralih ke praktik berkelanjutan yang dapat ditelusuri. Sebagai penyedia teknologi global, KOLTIVA membangun rantai pasokan yang etis, transparan, dan berkelanjutan, mendukung perusahaan memperkuat ketahanan dan transparansi bisnis. KOLTIVA membantu bisnis dan pemasok mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan tuntutan konsumen di seluruh dunia melalui solusi ketertelusuran. Beroperasi di lebih dari 66 negara dan didukung oleh jaringan kantor dukungan pelanggan di 20 negara, KOLTIVA mendukung lebih dari 17.500 perusahaan dalam membangun rantai pasokan yang transparan dan kuat serta memberdayakan lebih dari 1.738.000 produsen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. www.koltiva.com

Vega Welingutami
Sr. Public Relations & Event Officer
+62 878 7643 2821
vega.welingutami@koltiva.com

Daniel Prasetyo
Head of Public Relations &
Corporate Communication
+62 8111 671 919
daniel.prasetyo@koltiva.com